

KETERLIBATAN STAKEHOLDER DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA UMKM DI KOTA BOGOR (STUDI KASUS PEMBERDAYAAN UMKM)

Sri Harini

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Djuanda Bogor

Email: sri.harini@unida.ac.id

Abstrak

Peranan strategis usaha mikro kecil dan menengah masih terkendala lemahnya daya saing produk dan permodalan serta kurangnya manajemen antara *stakeholder* dengan para pelaku usaha. Kemajuan UMKM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi membutuhkan peran serta pihak-pihak lain (*stakeholder*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketelibatan *stakeholder* dan seberapa besar pengaruh keterlibatan *stakeholder* (lembaga pendidikan, lembaga keuangan, koperasi dan asosiasi usaha) terhadap kinerja UMKM. Sampel penelitian yaitu 100 UMKM di Kota Bogor, dengan menggunakan *Proportionate Stratified Random Sampling*. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, pendekatan kuantitatif dan metode verifikatif. Data dianalisis dengan analisis regresi linear berganda, korelasi berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara keterlibatan *stakeholder* (lembaga pendidikan, lembaga keuangan, koperasi dan asosiasi usaha) terhadap kinerja UMKM. Peranan *stakeholder* sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan UMKM, dan dukungan dari pihak-pihak terkait akan membantu memajukan usaha, terutama usaha mikro.

Kata Kunci : Keterlibatan, stakeholder, kinerja, dan UMKM.

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika ekonomi kerakyatan telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing tinggi. Salah satu faktor pembangunan ekonomi kerakyatan yang memegang peran penting dan strategis adalah pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Strategi pengembangan UMKM dilakukan dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif serta meningkatkan akses pada sumber *financial*, akses pasar, kewirausahaan, kemampuan UMKM, pemberdayaan usaha skala mikro, dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Proses pemberdayaan UMKM melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Bertahannya UMKM terhadap krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 2008 menjadi alasan utama mengapa pemerintah harus memberikan

perhatian besar terhadap UMKM. Menurut laporan, selama periode tahun 2008-2012 terjadi pertumbuhan UMKM yang cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Pertumbuhan UMKM dan Tenaga Kerja Tahun 2008-2012

Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
1. Jumlah UMKM	51,409,612	52,764,750	54,114,821	55,206,444	56,534,592
2. Jumlah Tenaga Kerja	94,024,278	96,193,623	98,238,913	101,722,548	107,657,509
3. Pertumbuhan UMKM (%)	-	2,64%	2,56%	2,02%	2,41%
4. Pertumbuhan Tenaga Kerja (%)	-	2,31%	2,13%	3,55%	5,83%

Sumber : Biro Pusat Statistik, 2012

Dalam laporan menjelaskan jumlah UMKM selama periode tahun 2008-2012 mengalami peningkatan sebanyak 5,124,980 unit dan tenaga kerja sebanyak 13,633,231 orang. Selain mengurangi tingkat pengangguran, baik pada tingkat lokal maupun nasional, produk-produk UMKM setidaknya telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional karena sebagian dari produk UMKM mampu menembus pasar internasional.

UMKM sangat berperan dalam memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Meski demikian, UMKM juga masih memiliki beberapa kendala antara lain dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, teknologi, permodalan dan iklim usaha.

Dalam rangka meningkatkan kinerja UMKM, partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) sangat menentukan keberhasilannya. Menurut Wilcox dalam Muluk (2007), partisipasi akan bekerja dengan baik apabila semua pemangku kepentingan puas dengan level partisipasi, tempat di mana mereka dilibatkan, artinya semua pihak yang berkepentingan merasa bahwa hak dan kewajibannya dalam proses pembuatan keputusan telah terpenuhi.

Menurut Harahap dalam Hadi (2011), tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas pada indikator ekonomi (*economic focused*) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (*social dimentions*) terhadap *stakeholder*, baik internal maupun external. *Stakeholder* merupakan semua pihak baik internal maupun external yang memiliki hubungan, baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Dengan demikian, *stakeholder* merupakan pihak internal maupun external, seperti: intansi pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, koperasi, lembaga keuangan dan asosiasi usaha, dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan. Sejauh ini keterlibatan *stakeholder* masih belum optimal dalam meningkatkan kinerja UMKM keterlibatan bersifat sendiri-sendiri dan kurangnya koordinasi antara *stakeholder* satu dengan yang lain. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah pro UMKM melalui Undang-undang dan Peraturan Pemerintah diharapkan mampu menciptakan UMKM yang berdaya saing.

Pemberdayaan UMKM secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di atas enam persen per tahun. Selain mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, memperbaiki sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan UMKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumber daya lokal.

Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan yang dikelola oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen Koperasi dan UMKM. Namun demikian usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya. Kenyataannya kemajuan UMKM masih rendah, serta masih banyak permasalahan yang dihadapi UMKM mulai dari manajemen usaha, pemasaran, akses permodalan, teknologi, dan kebijakan pemerintah. (Sudaryanto dan Hanim, 2002).

Kinerja merupakan suatu pencapaian pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata tercermin keluaran yang dihasilkan. (Simamora, 2004). Sedangkan menurut Alasadi dan Abdelrahim (2007) menyatakan kinerja pada UMKM dapat dilihat dari

kepuasan pemilik atau manajer (*dependen variabel*) atas: profit, omset, tahap balik modal (*Break Even Point*) dan pengembangan usaha.

Kondisi sektor UMKM di Kota Bogor selama periode tahun 2013-2014 mengalami peningkatan secara umum, dari enam kecamatan selama periode tersebut dua kecamatan yang mengalami penurunan jumlah unit usaha, yaitu kecamatan Bogor Timur dan Tanah Sareal, sedangkan Kecamatan Bogor Utara tidak mengalami pertumbuhan ataupun penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Pertumbuhan UMKM Kota Bogor Tahun 2013-2014

Keterangan Wilayah	Tahun		Pertumbuhan/penurunan
	2013	2014	
Kecamatan Bogor Barat	2,360	2,513	153
Kecamatan Bogor Selatan	2,316	2,577	261
Kecamatan Bogor Utara	1,904	1,904	0
Kecamatan Bogor Timur	1,267	1,125	-142
Tanah Sareal	1,480	1,421	-59
Kecamatan Bogor Tengah	1,719	1,757	38
Total	11,046	11,297	

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor, 2014

Dalam laporan tersebut, dua kecamatan yang mengalami penurunan jumlah unit usaha, yaitu kecamatan Bogor Timur dan Tanah Sareal. Menurut Kepala Bagian UMKM Kota Bogor. Penurunan tersebut disebabkan karena persaingan usaha yang semakin ketat sebagai dampak dari perdagangan bebas, seperti masuknya produk dari Negara China dan Korea, dengan harga yang murah tetapi memiliki mutu dan kualitas yang baik, sehingga banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak mampu bertahan ditengah krisis tersebut. Sedangkan di kecamatan Bogor Utara jumlah unit usaha masih tetap berjumlah 1,904 unit. Kondisi ini diperlukan perhatian yang khusus dari pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga dapat bersaing, baik dengan produk perusahaan-perusahaan modern ataupun dengan produk *impor*. Selain itu partisipasi baik dari Pemerintah, Perguruan Tinggi, Perbankan atau dari lembaga-lembaga terkait untuk pemberdayaan UMKM sangat diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) Kota Bogor, yang tersebar di Kecamatan Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Utara, Bogor Timur, Bogor Tengah dan Tanah Sareal. Penelitian dilakukan mulai bulan Maret-Agustus 2015. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan metode verifikatif.

Populasi yang menjadi sasaran penelitian ini adalah pelaku usaha mikro kecil menengah Kota Bogor yang berjumlah 11.297 unit. Mengingat banyaknya jumlah UMKM di Kota Bogor maka untuk menentukan jumlah sasarannya ditentukan teknik sampling Slovin (Umar : 2008), dengan *Proportionate Stratified Random Sampling*.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, untuk data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner. Data sekunder diperoleh dengan cara studi literature, data dari disperindag, dan instansi terkait, buku teks, jurnal, laporan ilmiah, dan berbagai peraturan yang relevan.

Data penelitian dianalisa dengan dua cara, analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui peran stakeholder lembaga pendidikan, lembaga keuangan, koperasi, asosiasi usaha dan kinerja UMKM Kota Bogor. Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keterlibatan stakeholder (lembaga pendidikan, lembaga keuangan, koperasi dan asosiasi usaha) terhadap kinerja UMKM di Kota Bogor melalui serangkaian uji statistic yang meliputi analisis regresi, dan analisis korelasi, koefisien determinasi dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel penelitian adalah UMKM Kota Bogor yang berjumlah 100 responden, tersebar di enam kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Utara, Bogor Timur, Bogor Tengah dan Tanah Sareal. Berdasarkan karakteristik responden dapat disimpulkan bahwa sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dengan usia antara 31-40 tahun, telah menjalankan usahanya antara 1-5 tahun, memiliki pendidikan SLTA serta berstatus memiliki tempat usaha sendiri.

Kinerja UMKM tidak terlepas dari peran *stakeholder* (lembaga pendidikan, lembaga keuangan, koperasi dan asosiasi usaha), keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan. Sejauh ini keterlibatan *stakeholder* masih belum optimal dalam meningkatkan kinerja UMKM keterlibatan bersifat sendiri-sendiri dan kurangnya koordinasi antara *stakeholder* satu dengan yang lain.

Tabel 3 Rekapitulasi Keterlibatan Lembaga Pendidikan

No	Uraian	Penilaian Responden	Keterangan
1	Pelatihan manajerial	4,10	Tinggi
2	Pelatihan pembukuan dan keuangan	4,09	Tinggi
3	Pelatihan kewirausahaan	4,21	Sangat Tinggi
4	Pelatihan etika bisnis	4,23	Sangat Tinggi
5	Pelatihan sertifikasi mutu produk	4,20	Sangat Tinggi
6	Pelatihan teknologi informasi	4,24	Sangat Tinggi
Rata-rata penilaian		4,18	Tinggi

Berdasarkan Tabel 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan *stakeholder* lembaga pendidikan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini diperlukan peran dari lembaga pendidikan dalam pelatihan manajerial, pelatihan pembukuan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan etika bisnis, pelatihan sertifikasi mutu produk dan pelatihan teknologi informasi. Angka penafsiran tertinggi 4,24 terhadap pelatihan teknologi informasi yang menunjukkan bahwa responden sangat membutuhkan pengetahuan dan wawasan untuk mengembangkan produk serta memasarkannya secara lebih luas sesuai perkembangan IPTEK. Sedangkan angka penafsiran terendah 4,09 terhadap pelatihan pembukuan dan pengelolaan keuangan termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel 4 Rekapitulasi Keterlibatan Lembaga Keuangan

No	Uraian	Penilaian Responden	Keterangan
1	Membantu UMKM dibidang kredit/pembiayaan	4,09	Tinggi
2	Pelatihan pembuatan proposal kredit	3,85	Tinggi
3	Melakukan identifikasi pada calon usaha UMKM	3,92	Tinggi
4	Melakukan monitoring pasca penerimaan kredit	3,93	Tinggi
5	Melakukan pembinaan pencatatan arus kas	3,80	Tinggi
Rata-rata penilaian		3,92	Tinggi

Berdasarkan Tabel 4 tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan *stakeholder* lembaga keuangan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini diperlukan peran lembaga keuangan dalam membantu UMKM dibidang kredit/pembiayaan, pelatihan pembuatan proposal kredit, melakukan identifikasi pada calon usaha UMKM, melakukan monitoring pasca penerimaan kredit dan melakukan pembinaan pencatatan arus kas. Angka penafsiran tertinggi 4,09 terhadap membantu UMKM dibidang kredit/pembiayaan yang menunjukkan bahwa responden sangat terbantu lembaga keuangan terutama bantuan permodalan dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan angka penafsiran terendah 3,80 bahwa lembaga keuangan sudah melakukan pembinaan pencatatan arus kas terhadap UMKM namun masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan secara rutin dan berkelanjutan.

Tabel 5 Rekapitulasi Keterlibatan Koperasi

No	Uraian	Penilaian Responden	Keterangan
1	Pendanaan melalui program KSP/USP	4,13	Tinggi
2	Program kerjasama pengadaan barang	4,07	Tinggi
3	Pembinaan UMKM	4,15	Tinggi
Rata-rata penilaian		4,12	Tinggi

Berdasarkan Tabel 5 tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan *stakeholder* koperasi termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini diperlukan peran koperasi seperti dalam memberikan alternatif bantuan pendanaan melalui program KSP/USP, melalui program kerjasama pengadaan barang dan dengan pembinaan UMKM. Angka penafsiran tertinggi 4,15 hal ini menunjukkan keterlibatan koperasi terhadap pembinaan UMKM membantu meningkatkan pengetahuan dan wawasan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan angka penafsiran terendah 4,07 menunjukkan koperasi telah melakukan pembinaan pencatatan arus kas terhadap pelaku UMKM, namun perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk membantu pelaku UMKM agar secara konsisten melakukan pencatatan kas secara rutin dan benar.

Tabel 6 Rekapitulasi Keterlibatan Asosiasi Usaha

No	Uraian	Penilaian Responden	Keterangan
1	Pelayanan Informasi berkaitan dengan Perdagangan dan Perindustrian	4,09	Tinggi
2	Pembinaan para pelaku usaha muda	3,85	Tinggi
3	Advokasi usaha	3,76	Tinggi
4	Pengembangan Usaha (Peningkatan Kualitas Produk dan Pasar)	4,02	Tinggi
5	Membantu akses pasar dengan mengikutsertakan pengusaha UMKM dalam kegiatan pameran baik regional, nasional maupun internasional	4,18	Tinggi
Rata-rata penilaian		3,98	Tinggi

Berdasarkan Tabel 6 tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan *stakeholder* asosiasi usaha termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini diperlukan peran asosiasi usaha seperti dalam memberikan pelayanan informasi berkaitan dengan perdagangan dan perindustrian, pembinaan para pelaku usaha muda, advokasi usaha, pengembangan usaha (peningkatan kualitas produk dan pasar) dan membantu akses pasar dengan mengikutsertakan pengusaha UMKM dalam kegiatan pameran baik regional, nasional maupun internasional. Angka penafsiran tertinggi 4,18 terhadap membantu akses pasar dengan mengikutsertakan pengusaha UMKM dalam kegiatan pameran baik regional, nasional maupun internasional yang menunjukkan bahwa responden sangat membutuhkan pengetahuan dan bantuan dari pihak terkait untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan angka penafsiran terendah 3,76 terhadap advokasi usaha termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel 7 Rekapitulasi Kinerja UMKM

No	Uraian	Penilaian Responden	Keterangan
1	Mencapai Keberhasilan	4,13	Baik
2	Kepuasan	3,84	Baik
3	Pencapaian Tujuan	4,04	Baik
4	Penjualan	3,90	Baik
5	Keuntungan	3,73	Baik
6	Pertumbuhan/Aset	3,96	Baik
Rata-rata penilaian		3,93	Baik

Berdasarkan Tabel 7 tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja UMKM termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini diperlukan peran *stakeholder* (lembaga pendidikan, lembaga keuangan, koperasi dan asosiasi usaha) dalam mencapai

keberhasilan, kepuasan, pencapaian tujuan, penjualan, keuntungan dan pertumbuhan/asset. Angka penafsiran tertinggi 4,13 terhadap mencapai keberhasilan yang menunjukkan bahwa responden menekankan terhadap keterlibatan *stakeholder* (lembaga pendidikan, lembaga keuangan, koperasi dan asosiasi usaha) dalam pencapaian keberhasilan, karena akan menentukan kesuksesan UMKM. Sedangkan angka penafsiran terendah 3,73 terhadap keuntungan meskipun keterlibatan *stakeholder* dalam rangka meningkatkan kinerja UMKM sudah dilakukan namun perlu upaya berkelanjutan agar mampu meningkatkan keuntungan UMKM.

Besarnya pengaruh variabel independen antara keterlibatan *stakeholder* (lembaga pendidikan, lembaga keuangan, koperasi dan asosiasi usaha terhadap variabel dependen kinerja UMKM secara simultan dapat dilihat dari *R Square*, yang bisa dilihat pada Tabel 8 berikut :

**Tabel 8 Pengujian Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.673 ^a	.453	.430	2.078

a. Predictors: (Constant), Lembaga Pendidikan, Lembaga Keuangan , Koperasi , Asosiasi usaha
Sumber : Data Primer diolah 2015

Berdasarkan Tabel 8 hasil yang diperoleh dari *R Square* sebesar 0,453 atau 45,3%, hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangsih pengaruh variabel lembaga pendidikan, lembaga keuangan, koperasi, asosiasi usaha terhadap kinerja UMKM sebesar 45,3%. Sedangkan sisanya sebesar 54,7% dipengaruhi variabel lain, seperti: kebijakan pemerintah pusat/daerah, lembaga swasembada masyarakat, pasar dan lain-lain. Sedangkan koefisien korelasi berganda digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel lembaga pendidikan, lembaga keuangan, koperasi dan asosiasi usaha terhadap kinerja UMKM. Hal ini dapat dilihat dari nilai R yaitu sebesar 0,673 termasuk dalam kategori kuat.

Untuk mengetahui pengaruh keterlibatan *stakeholder* (lembaga pendidikan, lembaga keuangan, koperasi dan asosiasi usaha) terhadap kinerja UMKM. Data dari hasil kuesioner ditabulasikan dan diolah dengan program SPSS versi 20 dengan hasil Tabel 9 :

Tabel 9 Hasil Uji SPSS 20
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression Residual	339.893	4			
Total	410.107	95	84.973	19.684	.000 ^b
	750.000	99	4.317		

a. Dependent Variable: Kinerja UMKM

b. Predictors: (*Constant*), Lembaga Pendidikan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Asosiasi usaha
 Sumber : Data Primer diolah 2015

Berdasarkan nilai F pada Tabel 9 tersebut Fhitung sebesar 19,684 dan nilai Ftabel untuk $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan $V1 = 4-1=3$ dan $V2 = 100-4-1=95$ sebesar 2,46 di mana bisa dilihat bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel ($19,684 > 2,46$) maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya dengan tingkat kepercayaan 95% variabel independen keterlibatan *stakeholder* lembaga pendidikan, lembaga keuangan, koperasi dan asosiasi usaha berpengaruh positif dan signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen kinerja UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian keterlibatan stakeholder terhadap kinerja UMKM di Kota Bogor, maka disimpulkan bahwa:

1. Kinerja UMKM secara keseluruhan termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai (3,93). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UMKM di Kota Bogor terus mengalami peningkatan, tetapi masih diperlukan perhatian untuk lembaga keuangan dalam hal permodalan, peran pemerintah dalam memberikan kebijakan berupa bantuan untuk UMKM perlu lebih ditingkatkan dan pihak terkait seperti lembaga pendidikan, koperasi dan asosiasi usaha serta pihak lain hendaknya bekerjasama agar terciptanya peningkatan kinerja dan kesejahteraan bagi UMKM.
2. Secara simultan keterlibatan *stakeholder* lembaga pendidikan, lembaga keuangan, koperasi dan asosiasi usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kota Bogor.

DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian maka beberapa saran sebagai berikut:

1. Secara umum permasalahan UMKM tidak hanya dalam hal permodalan saja, namun harus berorientasi secara keseluruhan atas kebutuhan UMKM itu sendiri, baik kelompok maupun individu. Dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, koperasi dan asosiasi usaha diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM di Kota Bogor .
2. Perlu dipertimbangkan fasilitas permodalan yang diterima UMKM dari perbankan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan studi kelayakan dan *business plan* termasuk kemudahan dalam mendapatkan kredit. Serta adanya peningkatan pengadaan fasilitas *non finansial* seperti informasi, pendampingan, pameran/promosi, akses pasar dan peralatan untuk pengendalian mutu.
3. Bagi pihak peneliti selanjutnya, diharapkan perlu mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja UMKM selain lembaga pendidikan, lembaga keuangan, koperasi dan asosiasi usaha. yaitu seperti kebijakan pemerintah pusat dan daerah, LSM, pasar serta *bussines development service* (BDS).

DAFTAR PUSTAKA

- Alasadi, dan Abdelrahim, 2007, *Critical Analysis And Modelling of Small Business Performance* (Case Study: Syria). Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, Volume III, Issue 2.
- Badan Pusat Statistik. (2012). Pendapatan Nasional Indonesia 2008-2012, CV. Sukorejo Bersinar, Jakarta.
- Disperindagkop. (2015). Daftar Industri Kecil dan Menengah tahun 2015-2016 di Kota Bogor, Bogor.
- Hadi, Nor, 2011, Corporate Social Responsibility, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muluk, K. (2007). Model Peran Pemerintah Daerah, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Bayumedia Publishing. Malang.
- Simamora, Henry, 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Ke-3, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Sudaryanto dan Hanim, Anifatul. (2012). Evaluasi Kesiapan UKM Menyongsong PasarBebas ASEAN (AFTA): Analisis Perspektif dan Tinjauan Teoritis. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol 1 No 2, Desember 2002.
- Umar, Husein, (2008). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi Kedua. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.